

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Salah satu peranan yang dilakukan pemerintah dalam membangun perekonomian adalah dengan membentuk gerakan ekonomi rakyat atau badan usaha. Adapun jenis-jenis badan usaha di Indonesia terdiri dari Koperasi, BUMN, Perjan, Perum, Persero, BUMS, Perusahaan Persekutuan, dan Yayasan. Salah satu gerakan ekonomi maupun badan usaha tersebut adalah koperasi. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Perkoperasian ayat (a) berbunyi: "...bahwa koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi."

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 Ayat ke-1, menyatakan perekonomian Indonesia disusun sebagai upaya usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan dalam pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran orang-seorang dan juga bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Penjelasan dalam pasal 33 itu menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru dalam perekonomian nasional maupun sebagai bagian dari integral tata perekonomian nasional.

Dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti diatas, maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan dengan cepat, pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud perannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah Jawa Barat khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya membangun perekonomian rakyat melalui pembinaan serta pengawasan terhadap koperasi dan usaha kecil yang ada di Jawa Barat. Salah satunya dengan mengeluarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 yang didalamnya bertujuan “Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan melalui penguatan ekonomi pedesaan dan regional.”

Namun kebijakan pemerintah dalam pengembangan koperasi selalu menimbulkan pro kontra. Pemerintah dianggap sebagai salah satu penyebab menipisnya kemandirian koperasi seperti pemerintah terkesan terlalu over simpati, cenderung dominan dan banyak juga yang menilai pemerintah terlalu campur tangan dengan urusan internal koperasi, sehingga koperasi cenderung ketergantungan dan cenderung tidak serius dalam aktivitas. Sampai akhirnya pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 1984 dan menetapkan kebijakan baru

yaitu Inpres Nomor 18 tahun 1998 sehingga koperasi dapat dibangun tanpa batasan wilayah kerja, koperasi menjadi lebih mandiri dan bebas melakukan aktivitas usahanya tanpa campur tangan pemerintah.

Permasalahan belum berhenti karena dalam posisi sebagai alat pelaksana program-program pemerintah, koperasi justru senantiasa dimanjakan dengan kebijakan pemerintah seperti sarana yang diperlukan koperasi, peraturan-peraturan, kredit, biaya kegiatan tertentu disediakan oleh pemerintah melalui anggaran pembangunan serta sumber-sumber lain.

Dengan demikian koperasi tidak perlu membangun kemampuan dirinya karena lebih mudah dan sangat tergantung kepada pemerintah sehingga bila fasilitas pemerintah di cabut, maka akan menurun pula aktivitas koperasi bahkan tidak menutup kemungkinan akan berhenti sama sekali. Untuk itu perlu ada suatu langkah *emergency* untuk melakukan revisi total kepada segenap komponen masyarakat koperasi untuk membenahi aspek mikro yang terkait dengan masalah organisasi dan manajemen serta kemampuan para pengelola koperasi dan anggotanya untuk memikul tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana di tetapkan bagi organisasi koperasi dan sesuai dengan definisi koperasi.

Koperasi-koperasi yang berada di Jawa Barat saat ini sangat banyak, namun penulis melihat masih adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi di Jawa Barat. Adapun permasalahan yang terjadi pada operasional koperasi di Jawa Barat terdiri dari :

**Tabel 1**  
**Permasalahan Koperasi di Jawa Barat**

No	Jenis	Masalah
1.	Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lemahnya kesadaran</li> <li>2. Lemahnya partisipasi</li> <li>3. Lemahnya kedisiplinan</li> <li>4. Lemahnya jiwa kewirausahaan</li> <li>5. Lemahnya keterampilan</li> <li>6. Lemahnya pendidikan dan teknologi</li> <li>7. Adanya kepentingan pribadi</li> </ol>
2.	Permodalan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sulitnya sumber dana</li> <li>2. Adanya hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi</li> <li>3. Kurangnya inovasi dalam memperbanyak produk koperasi</li> </ol>
3.	Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lemahnya sistem manajemen koperasi</li> <li>2. Lemahnya modernisasi</li> <li>3. Lemahnya kemandirian koperasi</li> <li>4. Kurangnya pemasaran</li> <li>5. Sulitnya jaringan usaha dan perijinannya</li> <li>6. Koperasi belum mampu bertahan dalam berkompetisi dengan perbankan</li> <li>7. Sulitnya proses dalam mendirikan koperasi</li> <li>8. Sulitnya merekrut anggota</li> </ol>

Sumber daya manusia, permodalan, serta kelembagaan adalah menjadi hal pokok dalam permasalahan selama ini dan sudah seharusnya menjadi hal yang perlu diperhatikan apakah peran pemerintah telah maksimal dalam menggunakan

kebijakannya untuk membina koperasi yang ada di Jawa Barat sehingga menjadi koperasi yang berkembang dan maju.

Saat ini koperasi yang ada di Jawa Barat terdapat 891 koperasi primer (perseorangan) dan 40 koperasi sekunder, total koperasi yang ada di Jawa Barat adalah 931 koperasi. Namun koperasi yang berstatus aktif hanya 242 koperasi primer dan 29 koperasi sekunder, total 271 koperasi yang aktif. Sedangkan koperasi yang berstatus tidak aktif 649 koperasi primer dan 11 koperasi sekunder, total 660 koperasi yang tidak aktif. Jadi jika dilihat secara keseluruhan dari total 891 koperasi yang ada di Jawa Barat, yang berstatus aktif hanya 271 koperasi.

**Tabel 2**

**Data Koperasi Aktif dan Tidak Aktif**

No	Keterangan	Aktif	Tidak Aktif
1	Koperasi Primer	242	649
2	Koperasi Sekunder	29	11
	Total	271	660

Adapun peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dalam upaya memajukan dan mengembangkan koperasi di Jawa Barat masih mengandung kelemahan-kelemahan, meskipun dengan mengeluarkan program-program sebagai bentuk pembinaan terhadap koperasi yang tertuang dalam beberapa bidang seperti :

Tabel 3

## Program Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

No	Bidang	Program
1.	Kelembagaan Koperasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsolidasi koperasi Jawa Barat atau hari jadi koperasi (HARKOP)</li> <li>2. Bimbingan teknis laporan keuangan</li> <li>3. Penyusunan dokumen LFA</li> <li>4. Pendampingan Manajemen koperasi</li> <li>5. Akreditasi koperasi</li> <li>6. Temu konsultasi BH</li> <li>7. Bintek pengurus &amp; anggota koperasi</li> <li>8. Advokasi pendirian koperasi</li> <li>9. Sosialisasi peraturan perundang-undangan koperasi</li> </ol>
2.	Pemberdayaan Koperasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan teknis penanganan khusus bagi koperasi</li> <li>2. Pengembangan jaringan usaha koperasi keluar provinsi</li> <li>3. Bimbingan teknis pengembangan usaha koperasi</li> <li>4. Advokasi penguatan usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP)</li> <li>5. Bimbingan teknis pengawasan koperasi usaha simpan pinjam</li> </ol>

		6. Workshop penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi
3.	Pengawasan dan	1. Monitoring dan evaluasi
(1)	(2)	(3)
	pemeriksaan Koperasi	kepatuhan koperasi 2. Identifikasi dan verifikasi koperasi bermasalah. 3. Cabang dan pembubaran koperasi 4. Monitoring dan evaluasi pengawasan dan pemeriksaan koperasi usaha simpan pinjam 5. Monitoring dan evaluasi bagi koperasi dan usaha kecil anggota koperasi 6. Best Practice pengawasan dan penilaian koperasi usaha simpan pinjam

Dengan mengacu pada permasalahan yang telah diuraikan diatas, penelitian ini memfokuskan pada bidang koperasi dengan alasan keterbatasan waktu. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“PERANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT DALAM PEMBINAAN KOPERASI DI JAWA BARAT.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan diatas dan data awal dalam latar belakang, maka penulis merumuskan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dalam pembinaan koperasi di Jawa Barat?

2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam melakukan pembinaan pada koperasi ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dalam pembinaan koperasi di Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam melakukan pembinaan pada koperasi.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang baik bagi pengembangan bidang keilmuan maupun penerapannya. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna serta bermanfaat bagi perkembangan teori dan untuk kepentingan penelitian dimasa akan datang. Selain itu diharapkan mampu memberikan telaah terhadap fenomena peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dalam pembinaan koperasi di Jawa Barat, sehingga menjadi masukan bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian yang berhubungan dengan peranan pemerintah dalam pembinaan koperasi khususnya.

2. Praktis



a) Bagi Instansi atau Dinas

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan dalam pemecahan masalah yang sedang dihadapi para koperasi.

b) Bagi Koperasi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang pembinaan apa saja yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sehingga menambah wawasan anggota koperasi, pengurus koperasi dan calon anggota maupun calon pendiri koperasi.

c) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah sehingga dapat melihat peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dalam pembinaan koperasi di Jawa Barat serta kendala-kendala yang ada didalamnya.

d) Bagi Penulis

Memberikan tambahan wawasan bagi penulis mengenai koperasi serta peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dalam pembinaan koperasi di Jawa Barat.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

### 1. Peranan

Peranan merupakan aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dalam sistem sosial. Dalam hal ini penulis melihat bahwa peranan dapat

dilaksanakan ketika seseorang mempunyai kedudukan serta menjalankan hak maupun kewajiban yang dimilikinya sehingga orang tersebut menjalankan suatu peranan.

Penulis melihat dengan banyaknya koperasi yang ada di Jawa Barat ternyata ada lebih dari 50% adalah koperasi yang tidak aktif. Lantas bagaimana peranan pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dalam menangani hal ini serta dengan permasalahan yang sangat banyak dalam ruang lingkup koperasi di Jawa Barat itu sendiri. Karena jika memang pemerintah benar-benar memahami tentang banyaknya keunggulan koperasi, maka koperasi akan jauh lebih kuat dalam membantu perekonomian negara ini. Inilah beberapa keunggulan koperasi dibandingkan badan usaha lainnya adalah :

- a) Koperasi adalah badan usaha sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
- b) Koperasi selain fokus dengan usahanya, juga memperhatikan lingkungan sekitar usahanya, (tidak seperti BUMS yang rata-rata hanya fokus pada pencapaian laba maksimal).
- c) Dalam hal usaha simpan pinjam, menyimpan di koperasi tidak mengenakan beban administrasi dan lain-lain layaknya kita menyimpan uang di bank-bank umumnya.
- d) SHU (Sisa Hasil Usaha) akan dibagikan keseluruhan anggotanya sesuai dengan besar jasa dan modalnya.
- e) Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.

Dengan demikian peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dalam pembinaan kepada koperasi apakah sudah tepat, mengingat koperasi mempunyai keunggulan

yang telah diuraikan di atas, sehingga perlunya perhatian yang lebih mendalam terhadap koperasi dan bahwa koperasi adalah bentuk ekonomi demokrasi yang paling sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Soejono Soekanto (2013: 213) peranan mencakup :

- 1) Norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang didalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Perilaku yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

Merujuk pada uraian definisi tersebut, peranan merupakan perilaku seorang individu atau sekelompok orang yang dihadapkan pada status orang yang diembannya. Peranan juga adalah suatu konsep dari apa yang diperbuat atau dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan masyarakat sebagai suatu organisasi. Dalam hal ini menurut penulis peranan lebih didefinisikan pada fungsi suatu organisasi. Ataupun peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat kepada koperasi dalam hal pembinaan ini merupakan hal yang sangat krusial dalam menentukan pertumbuhan serta kemajuan koperasi sehingga koperasi mampu berkompetisi dengan badan usaha lain dan diminati oleh banyak masyarakat.

## 2. Pembinaan

Pembinaan merupakan suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berguna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan disebut juga sebagai bimbingan atau arahan yang dilakukan oleh orang yang lebih

berpengalaman kepada yang belum atau kurang berpengalaman. Atau penulis menyimpulkan bahwa pembinaan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk merubah tingkah laku individu serta membentuk kepribadiannya, sehingga apa yang dicita-citakan dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Pembinaan menjadi hal penting dalam perkembangan dan kemajuan sebuah koperasi. Terlebih koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dimana menggunakan sistem ekonomi demokrasi sesuai dengan Pancasila. Maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat harusnya lebih memberikan pembinaan terbaiknya kepada koperasi. Mengingat banyaknya keunggulan koperasi kelola oleh masyarakat melalui koperasi.

Pengembangan koperasi merupakan suatu usaha yang harus diperhatikan dan tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam tanggung jawab kita bersama untuk menjalankan semangat dan kehendak pasal 33 dalam Undang Undang Dasar 1945. Pembinaan yang terjadi di Jawa Barat dirasa masih belum maksimal, karena banyaknya pengurus dan anggota koperasi yang bermasalah, penguasaan manajemen yang tidak terstruktur, serta banyaknya koperasi yang tidak aktif karena berbagai faktor yang terjadi.

Oleh karena itu penulis mengambil teori Hamalik dan Thoha sebagai acuan pembinaan serta strategi pembinaan yang baik seperti apa, dengan demikian penulis dapat mengukur bagaimana peranan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat kepada Koperasi di Jawa Barat. Menurut Hamalik (2005: 10) dalam peningkatan, pengembangan, dan pembentukan tenaga kerja dilakukan dengan upaya pembinaan pendidikan dan pelatihan (diklat).

Thoha (2003: 7), pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang mengarah menjadi lebih baik. Sifat dan karakteristik pembinaan yang amat menonjol French dan Bell dalam Thoha (2003: 17), antara lain:

- a) Lebih memberikan penekanan walaupun tidak eksklusif pada proses kelompok dan organisasi dibandingkan dengan isi yang substantif.
- b) Memberikan penekanan pada kerja tim sebagai sebagai suatu kunci untuk mempelajari lebih efektif berbagai macam perilaku organisasi.
- c) Memberikan penekanan pada manajemen yang kolaboratif dari budaya kerja tim.
- d) Memberikan penekanan pada manajemen yang berbudaya sistem keseluruhan.
- e) Mempergunakan model action research.
- f) Mempergunakan ahli-ahli perilaku sebagai agen pembaharuan atau katalisator.
- g) Suatu pemikiran dari usaha perubahan tersebut haruslah ditunjukkan bagi proses-proses yang sedang berlangsung.

Adapun untuk mencapai pembinaan yang baik diperlukan strategi pembinaan guna mencapai hasil yang diinginkan. Strategi pembinaan terdiri dari :

#### 1) Pendidikan dan Latihan (Diklat)

Menurut Hamalik (2005: 10), pelatihan adalah suatu proses yang didalamnya meliputi serangkaian tindakan (upaya) yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk upaya pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja professional pelatihan dalam satuan waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu yang berguna meningkatkan efektivitas serta produktifitas tenaga kerja.

Diklat sangat diperlukan bagi para pengurus ataupun anggota koperasi, sebagai modal mereka agar mampu mengurus dan mengembangkan koperasi dengan baik. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sudah seharusnya memberikan pelatihan-pelatihan terkhususnya bagaimana mengelola koperasi yang

baik, karena mengingat para pengurus koperasi dan anggota masih minim pengetahuan tentang wirausaha, teknologi, dan manajemen yang baik.

## 2) Penekanan pada Manajemen

Suatu sistem manajemen dalam koperasi sangat perlu diperhatikan, karena menyangkut pengelolaan usaha tersebut sehingga dapat menghasilkan pencapaian-pencapaian yang diinginkan. Menurut (Hamalik 2005: 10), “Manajemen adalah keseluruhan proses kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara formal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sesuai dengan rumusan ini, maka kegiatan-kegiatan manajemen dilaksanakan dalam fungsi-fungsi perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, koordinasi, supervisi, pemantauan, ketenagaan dan penilaian serta kepemimpinan yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi itu.”

Oleh karena itu penekanan pada manajemen koperasi harus diperhatikan, mengingat koperasi dituntut untuk melaksanakan pelayanan yang profesional agar dapat berkompetisi dengan badan usaha lain. Perlunya perhatian pemerintah sebagai wadah untuk membimbing para pengelola koperasi ini agar semakin berkembang.

## 3) Aspek Permodalan

Dengan adanya pembinaan dalam arti pemberian modal kerja dari pemerintah yang berupa sarana dan prasarana merupakan salah satu manfaat bagi para koperasi untuk melangkah lebih maju. (Sumarna, 1988) dalam buku *Dinamika Koperasi* (Anaroga, Widiyawati: 128) dalam pemberian bantuan permodalan diberikan melalui :

- a) Pemberian sistem simpan pinjam dengan pembayaran kembali dengan tenggang waktu.
- b) Penyediaan barang-barang modal dengan cara kredit dan hibah.
- c) Mempergunakan ahli-ahli perilaku sebagai agen pembaharuan atau katalisator.
- d) Suatu pemikiran dari usaha perubahan tersebut haruslah ditunjukkan bagi proses-proses yang sedang berlangsung.

Terdapat hubungan positif antara tingkat penguasaan modal dengan tingkat pemanfaatan hasil pembangunan. Dengan akses lebih besar terhadap modal, koperasi diharapkan dapat menikmati perolehan pembangunan secara lebih besar pula.

#### 4) *Action Research*

Suatu organisasi tidak akan pernah luput dari sebuah masalah, oleh karena itu untuk tercapainya sebuah pencapaian yang diinginkan, perlu adanya pendekatan untuk memecahkan masalah yang terjadi, oleh karena perlu dilakukan penelitian dan analisis sehingga suatu masalah dapat dipecahkan dengan menarik benang merah penyebab permasalahan yang terjadi, lalu dilakukan tindakan-tindakan guna memecahkan masalah yang ada.

*Action research* adalah istilah untuk menamakan suatu riset yang diikuti dengan suatu tindakan pelaksanaan dari hasil-hasil yang disebutkan dalam riset tersebut (Brown, 1972) dalam Thoha (2003: 38), model action research adalah sebagai berikut :

- a) Identifikasi masalah

- b) Konsultasi dengan ahli ilmu perilaku
- c) Pengumpulan data dan diagnosa awal oleh konsultan
- d) Umpan balik kepada klien atau kelompok
- e) Diagnose bersama terhadap masalah
- f) Tindakan (action)
- g) Pengumpulan data setelah fase tindakan

Ataupun dobrakan-dobran pemerintah seperti kebijaksanaan pembangunan koperasi apakah sudah sesuai dengan program pembinaan yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat seperti yang dikatakan dalam buku Perkoperasian (Firdaus, Susanto 2004: 110) :

- a) Menumbuhkan iklim berusaha yang kondusif,
- b) Dukungan perkuatan bagi koperasi (keuangan, jasa pengembangan bisnis),
- c) Peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi,
- d) Peningkatan dalam penguasaan teknologi,
- e) Peningkatan penguasaan informasi,
- f) Peningkatan penguasaan pasar,
- g) Pengembangan organisasi dan manajemen koperasi,
- h) Peningkatan kualitas keanggotaan koperasi.

Serta bagaimana ukuran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Povinsi Jawa Barat dalam membuat strategi pembinaan, apakah ada litbang atau riset yang di lakukan, sehingga pembinaan lebih efektif dan sesuai dengan permasalahan yang terjadi.

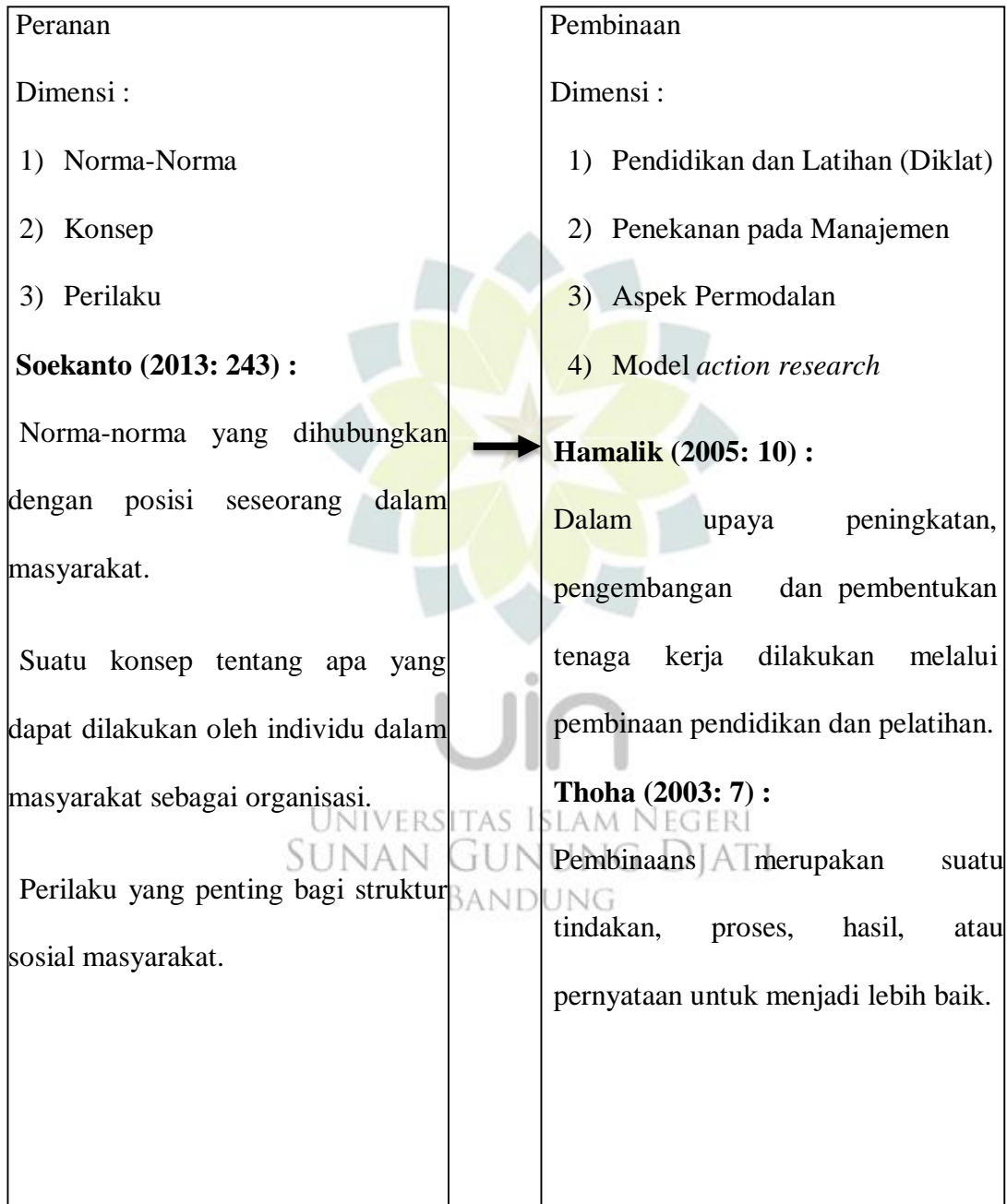
## 1.6 Proposisi

Adapun proposisi dalam penelitian ini adalah Peranan dinas koperasi dan usaha kecil provinsi jawa barat dalam pembinaan koperasi di jawa barat pelaksanaannya berjalan dengan baik jika 2 (dua) dimensi yaitu : Peranan dinas koperasi dan pembinaan yang dilakukan berjalan dengan baik pula.



## Gambar

### Kerangka Pemikiran Penelitian





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG